



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Daerah dimaksudkan sebagai komitmen Pemerintah Daerah terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tolitoli;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dan menfokuskan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Tolitoli sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Tolitoli Tahun 2019-2021.
2. RAD TPB merupakan pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam upaya pencapaian target TPB.
3. Dokumen RAD TPB Provinsi Sulawesi Tengah perencanaan daerah lainnya merupakan acuan Dalam penyusunan RAD TPB.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
5. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II RAD TPB

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tercantum dalam Lampiran matriks yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan RAD TPB Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :

- a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
- b. pihak Ketiga.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Penyelenggaraan RAD TPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

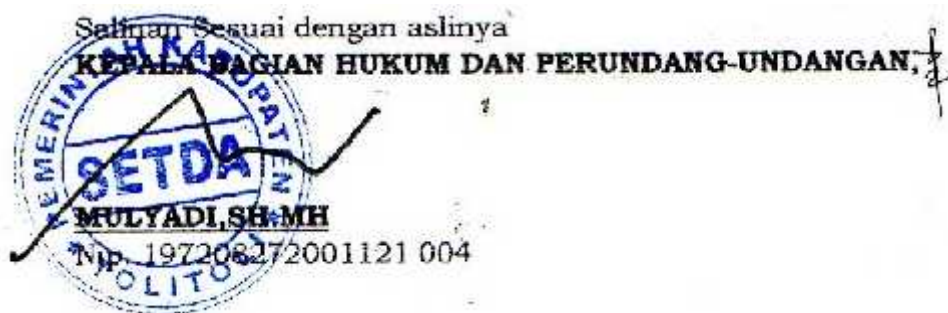
Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 24 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 259



**MATRIKS I. TARGET DAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016-2021**

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN									
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	13,64	13,47	13,30	13,13	12,96	12,75	12,50	BPS, Bappeda, Dinsos
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	1.3.1 (a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan								Dinas Kesehatan
	1.3.1.(b)). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial	0.40	0.42	0.43	0,43	0,44	0,42	0,40	Dis Naker
	1.3.1.(d)). Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2,262	5,397	5,311	9,751	11,251	13,051	14,888	Dinsos
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki- laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1 (a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	76.2	81.85	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1.4.1.(d)). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)		59.1	48.41	50	52	54	56	Dinas PUPR
	1.4.1.(e). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)		27,13	31	32	34	36	40	Dinas PUPR

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	1.4.1.(f). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)								DisPUPR
	1.4.1.(g). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	89,31 (2015)	92,58	91,77					Dikbud
	1.4.1.(h). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	63,55 (2015)	69,93	66,88					Dikbud
	1.4.1.(i). Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	68,05 (2015)	55,38	59,54					Dikbud
	1.4.1.(j). Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)		56.9	59.5	66.22	70.5	73.5	75.5	Disdukcapil
	1.4.1.(k). Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok								PLN/ESDM
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			4	1	1	1	1	BPBD
	1.5.1.(a). Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	2 (2015)	2	4	6	7	10	11	BPBD
	1.5.1.(e). Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	4 (2015)	4	4	2	2	1	1	BPBD
	1.5.3*. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	4 (2015)	4	4	6	6	8	10	BPBD
TUJUAN 3.									
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.2*. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	79,9 (2015)	81.5	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	3.1.2.(a). Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	76,2 (2015)	81.85	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang	0,27(2015)	0.27	0.04	0.5	0.4	0.4	0.02	Dinas Kesehatan
	3.3.5*. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	4,07 (2015)	2.66	1.84	< 1	< 1	< 1	< 1	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a) Persentase merokok pada penduduk umur	6,9(2015)	6.4	5.9	5.6	5.4	5.2	5,0	Dinas Kesehatan
	3.4.1.(b). Prevalensi tekanan darah tinggi.	15,7 (2015)	20.9	13.1	23.79	23.38	23.38		Dinas Kesehatan
	3.4.1.(c). Prevalensi obesitas pada penduduk umur	15,4 (2015)	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	Dinas Kesehatan
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan..	3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi								Dinas Kesehatan
	3.5.1.(c). Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.								Dinas Kesehatan
	3.5.1.(d). Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah								Dinas Kesehatan
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan	7,85 (2015)	7,06	7	6,5	5	5,5	5	Dinas Kesehatan
	3.8.2*. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	100 (2015)	53.156	162.126	166.597	100	100	100	Dinas Kesehatan
	3.8.2.(a). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	43.25	23.53	70.95	166.597	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	26.02	29.13	28.29					Dinas Kesehatan

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	7,2 (2015)	7,2	7,2	20	30	40	60	Dinas Kesehatan
TUJUAN 4.									
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii)	72.87	74.87	76.87	78.87	80.87	82.87	84.87	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca.	65.45	72.00	73.43	79.19	87.11	95.83	95.83	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) Matematika.	55.65	61.22	62.44	67.34	74.07	84.48	81.48	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca.	67.53	74.28	75.77	81.71	89.88	98.87	99.86	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD/kelas 6 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	67.53	74.28	75.77	81.71	89.88	98.87	99.86	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	67.53	74.28	75.77	81.71	89.88	98.87	99.86	Dikbud
	4.1.1*. Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.	67.53	74.28	75.77	81.71	89.88	98.87	99.86	Dikbud
	4.1.1.(d). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	110.85	110.34	110.34	110.34	110.44	110.54	110.64	Dikbud
	4.1.1.(e). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	108.31	107.84	107.84	107.84	107.94	108.04	108.14	Dikbud
	4.1.1.(f). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	90.95	78.05	78.05	78.05	78.15	78.25	78.35	Dikbud
4.1.1.(g). Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15	7.98	7.72	7.85	7.87	7.90	7.94	7.97	Dikbud	

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	116.73	31.37	31.37	31.37	31.47	31.57	37.67	Dikbud
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	90.95	78.05	78.05	78.05	78.15	78.25	78.35	Dikbud
	4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki	76.9	73.16	73.16	73.16	73.26	73.36	73,,46	Dikbud
	4.5.1* Rasio APM SD/MI/ sederajat	21.60	20.90	20.85	26.60	28.60	31.60	32.60	Dikbud
	4.5.1* Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	27.71	26.50	23.98	32.71	34.71	37.71	38.71	Dikbud
	4.5.1* Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat	34.05	30.45	30.60	39.05	36.05	42.05	43.05	Dikbud
	4.5.1* Rasio APK perempuan/laki-laki di PT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Dikbud
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	75.45	50.45	40.45	30.45	20.45	17.45	15.45	Dikbud
	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59	78.55	95.38	95.38	97.28	98.25	98.25	98.44	Dikbud
	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	65.17	40.17	30.17	20.17	10.17	7.17	5.17	Dikbud
	4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	76.65	95.38	95.38	97.28	98.25	98.25	98.44	Dikbud

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 5.									
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	20,36	40,17	40,51	50,89	60,86	70,54	75,90	DPPPA
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.2.(a). Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	30,15	30,12	20,98	30,87	40,88	50,67	50,96	DPPPA
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	2,10	2,65	2,65	2,65	2,0	1,65	1,00	DPPPA
	5.3.1.(c). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	90.95	78.05	78.05	78.05	78.15	78.25	78.35	Dikbud
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	45.96	45.96	42,42	38,42	47,25	50.10	.50.48	DPPPA
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								Kominfo

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
TUJUAN 7.									
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern	7.1.1* Rasio elektrifikasi								PLN
	7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita								PLN
	7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*								Dinas Perindustrian
	7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga								ESDM
TUJUAN 8.									
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita	9,5	7,30	10,10	13,06	13,53	14,01	14,57	Dinas Perindustrian
	8.1.1.(a) PDB per kapita.	26,922,474.40	28,886,673.70	31,749,343.50	35,895,703.90	40,753,869.70	45,518,000.90	51,004,273.60	Dinas Perindustrian
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang	4,89	20,21	5,076	6,72	6,32	2,81	3,60	Dis Naker
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	0,14	0,16	0,19	0,24	0,30	0,37	0,45	Dis Naker
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	8.10.1.(a) Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	45,02 (2011)							
TUJUAN 9.									
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang..	9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.								D. Perindustrian

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
--------------	-----------------	-------------	-------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Instansi Pelaksana
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020	9.c.1* Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.			.69.23	75.00	80	85	90	Din Kominfo
	9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.								Din Kominfo
	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan Internet.								Din Kominfo

TUJUAN 10.

10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.								DPPPA
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d). Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.								DPPPA
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b). Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	2880	2930	2980	3030	3080	3180	3230	DPPPA

TUJUAN 17.

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya	17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya..	742.06	826,57	1259,07	801,72	706,15	628,35	554,51	DPPKAD
	17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	295.14	332,68	398,74	359,63	316,76	281,86	248,74	DPPKAD
	17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DPPKAD

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	

yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	
TUJUAN 6.								

6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	70	71.14	72.04	92	100	100	100	Dinkes
	6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau		130	130	135	137	140	145	Dinas PUPR
	6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan	52,21	68	70	75	80	85	90	Dinas PUPR
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	45.83	50	70	80	95	100	100	Din Kes
	6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak		68	70	72	75	77	80	Dinas PUPR
	6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	25 (2015)	12	14	21	41	18	0	Dinkes
	6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar		15	20	30	35	40	45	Dinas PUPR
	6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.								
	6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		79	80	82	84	86	90	Dinas PUPR
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	73,5	75,64	77,21	81,50	84,23	86,88	91,40	DisPerkim
	6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	63,59	69,55	73,65	81,22	85,65	88,65	90,25	Dis Perkim
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat..	6.5.1.(a) Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang		2	5	7	10	12	15	Dinas PUPR

- 12 -

Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020		2021
TUJUAN 11.									
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi	11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki	71,73	72,83	73,42	74,55	76,35	78,43	80,51	Dinas Perkim

	100.000 penduduk.								
	16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan								
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	16,40	20,10						
	16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi..								
	16.3.2. (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan..								
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		50	55	60	65	70	90	Bag.Ortal Sekab
	16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah		20%	35%	50%	65%	75%	80%	Bappeda
	16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.								
	16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).								

- 16 -

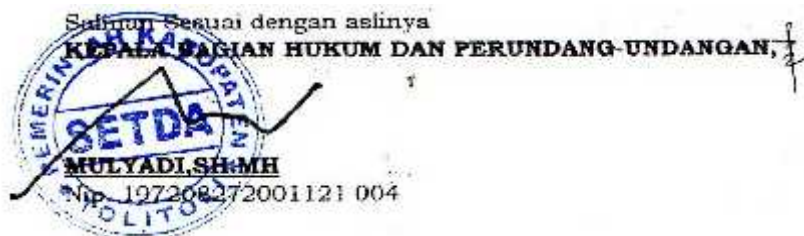
Target SDG's	Indikator SDG's	Tahun dasar	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan	16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		11,62	11,62	13,51	13,95	15,91	17,78	BKPSDM

16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur		56,22	60	60,5	60,1	60,25	60,5	Disdukcakil
	16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.								Disdukcakil
	16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta	40.19	56,9	59,5	68,22	70,5	73,5	75,5	Disdukcakil
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang								
	16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam					50	70	100	Bagian Humas Setkab
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional..								

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : 22 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019-2021

MATRIKS II. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016-2021

PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH												
INDIKATOR : 1.2.1 Persentase Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur												
PROGRAM: PEMBERDAYAAN FM, KAT DAN PMKAS LAINNYA												
Kegiatan 1: Verifikasi dan Validasi Data FM	Data Rumah Tangga Miskin	KK	16542	16542	14888	14988	15088	15188	15288	917,500,000	APBD	DINSOS
	2. RTLH	KK	100	500	500	550	550	600	600			
Kegiatan 2: Penanganan FM Kota dan desa	1. KUBE	KK	400	260	105	300	350	400	450	3,940,000,000	APBD, APBD I DAN APBN	DINSOS
	2. RTLH	KK	100	500	500	550	550	600	600			
Kegiatan 3: Penanganan FM Pesisir, Pulau Terluar dan Perbatasan	1. KUBE	KK				300	500	550	600	3,900,000	APBD, APBD I DAN APBN	DINSOS
	2. RTLH	KK					300	350	400			
INDIKATOR : 1.3.1 (b) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan Tunai bersyarat /program keluarga harapan												
PROGRAM: PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL												
Kegiatan 1: Bantuan Tunai bersyarat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan	KK	2262	5397	5311	9751	11251	13051	14888	3,098,125,930	APBD , APBN	DINSOS
PROGRAM NASIONAL PEMERINTAH												
INDIKATOR : 1.4.1 (a) Persentase Perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)												
PROGRAM: PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK												
Kegiatan 1: Peningkatan pelayanan, pembinaan dan penanggulangan masalah kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir serta usia subur	1. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	82,3 (2015)	84,28	99	100	100	100	100	9,369,415,000	APBD dan Jampersal	DINKES
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	79,9 (2015)	81,85	100	100	100	100	100			
	3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%		80,26	100	100	100	100	100			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR: 1.4.1.(d).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (kelompok penduduk 40 % terbawah)												
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah												
Kegiatan : pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum	1.1 Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum	%		70	75	80	82	85	90	40000.	DAU/DAK/APBN	DINAS PUPR
INDIKATOR: 1.4.1.(e).Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak(kelompok penduduk 40 % terbawah)												
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah												
Kegiatan : pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan sanitasi	1.1 Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi	%		70	75	80	82	85	90	20000.	DAU/DAK/APBN/HIBAH	DINAS PUPR
INDIKATOR 3.1.2 Proporsi perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih												
PROGRAM: PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK												
Kegiatan 1: Peningkatan pelayanan, pembinaan dan penanggulangan masalah kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir serta usia subur	1. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	82,3 (2015)	84,28	99	100	100	100	100	9,369,415,000	APBD dan Jampersal	DINKES
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	79,9 (2015)	81,85	100	100	100	100	100			
	3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%		80,26	100	100	100	100	100			
INDIKATOR 3.1.2 (a) Persentase perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya difasilitasi kesehatan												
PROGRAM: PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK												
Kegiatan 1: Peningkatan pelayanan, pembinaan dan penanggulangan masalah kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan bayi baru lahir serta usia subur	1. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	%	82,3 (2015)	84,28	99	100	100	100	100	9,369,415,000	APBD dan Jampersal	DINKES
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	79,9 (2015)	81,85	100	100	100	100	100			
	3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%		80,26	100	100	100	100	100			
INDIKATOR 3.3.3. Kejadian malaria per 1000 orang												
PROGRAM: PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR												
Kegiatan: 1 Malaria	1. Penyemprotan	%	0.27	0.27	0.04	0.5	0.5	0.5	0.5	Tidak ada dana	GFR	DINKES
	2. PE (Penyelidikan Epidemiologi) yang ada kasus	%										
	3. Supervisi / Pemantauan	%										
	4. Skrining ibu hamil (daerah endemis)	%										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp Juta) (4)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur <18 tahun												
PROGRAM: Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1. Pelatihan pelayanan terpadu PTM (deteksi dini dan penanggulangan kasus)	%	15.7(2015)	20.9	13.1	23.79	23.38			1,365,480,000	APBD	DINKES
	2. Pembentukan dan pelaksanaan posbindu PTM	%										
	3. Pelatihan kader posbindu PTM	%										
	4. Kampanye cerdas	%										
	5. Pelatihan dan konseling berhenti merokok	%										
	6. KIE pencegahan dan pengendalian PTM	%										
	7. Survelens PTM	%										
INDIKATOR 3.8.1 (a) Unmeet need pelayanan kesehatan												
PROGRAM: Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1:	(Masih sementara pendataan keluarga sehat, setelah selesai pendataan baru dapat ditentukan tindakan atau kebijakan apa yang akan dilaksanakan.											
INDIKATOR 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk												
PROGRAM: Upaya Kesehatan Masyarakat												
Kegiatan 1 :	1. Angka Kontak	%	100	100.0	100%	100%	100%	100%	100%	3.171.927.051	APBD dan Kapitasi	Dinkes
	2. Program Pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)	%	100	100.0	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%			
	3. Rujukan rawat jalan non spesialisistik (RNS)	%	100	100.0	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%			
INDIKATOR 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)												
PROGRAM: Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat												
Kegiatan 1 :	1. Angka Kontak	%	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	3.171.927.051	APBD dan Kapitasi	Dinkes
	2. Program Pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)	%	100	100	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%			
	3. Rujukan rawat jalan non spesialisistik (RNS)	%	100	100	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp. Juta) (4)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR 3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan												
PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM KESEHATAN DAN DATA INFORMASI KESEHATAN												
Kegiatan 1 : Pelatihan dan peningkatan mutu serta kompetensi tenaga kesehatan	1. Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan	%	80 (2015)	90,0	100	100	100	100	100	205,365,000	APBD	DINKES
Kegiatan 2 : Penyusunan perencanaan kebutuhan dan pengendalian distribusi serta pemenuhan penugasan tenaga kesehatan daerah	1. Tersedianya tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi PTT pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan di	%	7,2 (2015)	7,2	7,2	20	30	40	50	3,780,333,200	APBD	DINKES
	2. Tersedianya tenaga kesehatan perawat, analis, gizi dan kesehatan lingkungan sebagai pegawai tidak tetap(PTT) daerah yang bertugas di puskesmas dan jaringannya											
	3. Tersedianya tim based tenaga kesehatan melalui pelaksanaan program nasional nusantara											
	4. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja tenaga kesehatan PTT pusat dan tenaga kesehatan PTT											
	5. Terlaksana kegiatan koordinasi bersama dinas kesehatan provinsi dan kementerian kesehatan tentang penyusunan perencanaan kebutuhan, penerima tenaga kesehatan serta penempatan tenaga kesehatan di kabupaten tolitoli											
INDIKATOR :5.1.1 : Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan												
PROGRAM 1: Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender												
Kegiatan 1 : Fasilitas Pengembangan pusat pelayanan terpadu perempuan dan Anak	1.1 Pusat Pelayanan terpadu Perempuan dan Anak		40,17	40,51	50,89	60,86	70,54	75,90	900,000,000	APBD	DP3A	
INDIKATOR :5.2.2. (a) : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif												
PROGRAM 1: Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan												
Kegiatan 1 : Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan	1.1 penguatan hukum atas tindak kekerasan perempuan		30,12	20,98	30,87	40,88	50,67	50 96	600,000,000	APBD	DP3A	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2015)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020				2021
INDIKATOR :5.3.1 : Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun											
PROGRAM 1: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak											
Kegiatan 1 : Pendampingan pengaduan korban kekerasan terhadap anak dan eksploitasi	1.1 Sosialisasi tentang pernikahan dini serta penguatan hukum kekerasan anak dan eksploitasi		2,65	2,65	2,65	2,00	1,65	1,00	750,000,000	APBD	DP3A
INDIKATOR :5.3.1(c) : Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat											
PROGRAM 1: Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak											
Kegiatan 1 : pembentukan forum anak daerah	1.1 peningkatan pendidikan terhadap anak dan wadah aspirasi anak		71,18	71,18	71,18	60,00	50,00	40,55	800,000,000	APBD	DP3A
INDIKATOR :5.5.1 :Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah											
PROGRAM 1: Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan											
Kegiatan 1 : fasilitas pemenuhan hak ekonomi sosial budaya sipil politik yang berbasis gender	1.1 pemahaman hak serta kesetaraan peningkatan kualitas pendidikan		45,96	42,42	38,42	47,25	50,10	50,48	890,000,000	APBD	DP3A

PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN			SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN						INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.													
PROGRAM : PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT													
Kegiatan :	Pengawasan Kualitas air minum dan sanitasi dasar	1. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	%	67	70	87	95	100	100	100	500,000,000	DAU	Dinkes
		2. Kualitas air minum yang memenuhi syara	%	30	35	45	60	75	90	100	500,000,000	DAU	Dinkes
		3. Jumlah sarana air minum berkualitas yang dibangun	Sarana	0	0	0	10	20	30	40	650,000,000	DAK	Dinkes
		4. Pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLTA)	Desa	0	0	0	21	41	18	26	500,000,000	DAU/ADD	Dinkes
		5. Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit	Sarana	0	0	4	7	10	0	0	500,000,000	BOK	Dinkes
		6. Jumlah puskesmas yang memiliki water test kit	Unit	0	0	4	11	0	0	0		APBN	Dinkes
INDIKATOR: 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.													
PROGRAM : Program pembangunan infrastruktur perdesaan													
Kegiatan :	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1.1 Persentase penduduk berakses air minum	%		70	75	80	82	85	90	80000.	APBN	DINAS PUPR
INDIKATOR: 6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.													
PROGRAM : Program pembangunan infrastruktur perdesaan													
Kegiatan :	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	1.1 Persentase penduduk berakses air minum	%		70	75	80	82	85	90	40000.	DAU/DAK/APBN	DINAS PUPR
INDIKATOR: 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.													
PROGRAM: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
Kegiatan :	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)-II	1.1 Persentase jumlah rumah tangga berakses air Minum	%		70	75	80	82	85	90	35000.	APBN	DINAS PUPR
Kegiatan :	Pembangunan sanitasi dan MCK berbasis masyarakat	1.1 Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi	%		70	75	80	82	85	90	20000.	DAU/DAK	DINAS PUPR
INDIKATOR: 6.2.1.(d).Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).													
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
Kegiatan :	Pembangunan sanitasi dan MCK	1.1 Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi	%		70	75	80	82	85	90	10000.	DAU	DINAS PUPR
INDIKATOR: 6.2.1.(e).Jumlah desa/kelurahan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.													
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
Kegiatan :	PENGEMBANGAN SPALD-S	1.1 Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi	%		70	75	80	82	85	90	6000.	DAU/DAK	DINAS PUPR

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN			SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN						INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR: 6.2.1.(f).Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.													
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
Kegiatan :	PENGEMBANGAN SPALD-T	1.1 Persentase jumlah rumah tangga	%		70	75	80	82	85	90	20000.	DAU/DAK	DINAS PUPR
Indikator : 6.3.1.(a) Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.													
Program : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup													
Kegiatan 1	Pengelolaan dan Penataan TPA	1. Terkelolanya TPA dan IPLT secara sehat	%		75.64	77.21	81.50	84.23	86.88	91.40	42,000,000	APBN / DAK	DISPERKIM
2.	Penanganan Limbah Tinja	2. Meningkatnya kualitas pengelolaan Limbah di wilayah perkotaan dan perdesaan.	%		69.55	73.65	81.22	85.65	88.65	90.25	15,600,000	APBN / DAK	DISPERKIM
INDIKATOR: 6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah													
PROGRAM: Program Pengendalian Banjir													
Kegiatan :	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	1.1 1. Persentase sungai sebagai pengendali banjir dalam kondisi baik	%		40	50	62	65	70	75	25000.	APBN/DAU	DINAS PUPR
Indikator : 11.1.1.(a) Proporsi penduduk/rumah tangga yang memiliki Akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau (RLH).													
Program : Pengembangan Perumahan													
Kegiatan 1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	1. Tersedianya Rumah layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%		72.83	73.42	74.55	76.35	78.43	80.51	47,467,500	APBN / DAK	DISPERKIM
			Unit		52,495	52,920	53,730	55,030	56,530	58,030			
INDIKATOR : 11.2.1 (a) : Persentase pengguna moda transportasi umum													
PROGRAMA 1 : PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN													
Kegiatan 1 :	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	1.1. Tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang memadai	%		70%	75%	76%	77%	78%	80%	1,500,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
		1.2. Tersedianya angkutan yang aman dan selamat	%		50%	60%	65%	70%	75%	80%	700,000,000	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2 :	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	1.1. Meningkatnya kesadaran akan berlalu lintas pengemudi dan pelajar	%		50%	60%	70%	75%	80%	85%	750,000,000	APBD	Dinas Perhubungan

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN			SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN						INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021			
INDIKATOR:11.3.2.(b).Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.													
PROGRAM : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah													
Kegiatan : pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan sanitasi	pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan sanitasi	1.1 Persentase jumlah rumah tangga berakses sanitasi dan air minum	bh		3	3	3	3	3	3	40000.	DAK/APBN/HIBAH	DINAS PUPR
INDIKATOR 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)													
PROGRAM 1: Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam													
Kegiatan 1:	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana alam	1.1 Jumlah laporan kegiatan koordinasi kesiapsiagaan	laporan		2	2	2	2	2	2	15,800,000	APBD	BPBD
		1.2 Jumlah lokasi kegiatan fasilitasi kesiapsiagaan	lokasi		25	25	25	25	25	25	725,400,000	APBD	BPBD
		1.3 Jumlah dokumen rencana kontingensi	dokumen		8	8	8	8	8	8	16,000,000	APBD	BPBD
		1.4 Jumlah dokumen pedoman kesiapsiagaan	dokumen		5	5	5	5	5	5	11,550,000	APBD	BPBD
		1.5 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kesiapsiagaan	kegiatan		3	3	3	3	3	3	45,650,000	APBD	BPBD
PROGRAM: PENGURANGAN RISIKO BENCANA													
Kegiatan 1:	Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana	1.1 Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	dokumen		40	40	40	69	69	69	75,200,000	APBD	BPBD
		1.2 Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana	dokumen		17	19	19	19	19	19	41,650,000	APBD	BPBD
		1.3 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi		39	39	39	39	39	39	353,500,000	APBD	BPBD
		1.4 Jumlah lokasi fasilitasi penerapan mitigasi bencana	lokasi		39	41	41	41	41	41	95,250,000	APBD	BPBD
		1.4 Jumlah lokasi fasilitasi pengurangan risiko bencana regional	lokasi		4	4	4	4	4	4	37,250,000	APBD	BPBD
		1.5 Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	dokumen		4	5	5	5	5	5	21,540,000	APBD	BPBD
		1.6 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana	laporan		6	6	6	8	8	8	9,520,000	APBD	BPBD

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN						INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021					
		1.1 Jumlah relawan PB	relawan		200	200	200	200	200	200	57,460,000	APBD	BPBD
		1.2 Jumlah dokumen forum PRB	dokumen		8	10	12	14	14	14	31,650,000	APBD	BPBD
		1.3 Jumlah desa tangguh bencana	desa		20	20	20	20	20	20	389,750,000	APBD	BPBD
		1.4 Jumlah dokumen pedoman pemberdayaan masyarakat	dokumen		3	3	3	3	3	3	27,538,000	APBD	BPBD
		1.5 Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat	kegiatan		3	3	3	3	3	3	52,430,000	APBD	BPBD

Indikator : 11.6.1.(a) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani

Program : Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Kegiatan 1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Wil. Kabupaten	%		61.10	67.64	69.51	72.18	78.86	82.87	32,150,000	APBN / DAK	DISPERKIM
2.	Pengawasan dan Operasional Pengangkutan Sampah	2. Cakupan Sampah di wilayah Perkotaan dapat tertangani											

INDIKATOR : 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.

PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA /PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	dokumen		10	10	10	10	10	10	450,750,000	APBD	BPBD
		Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	dokumen		20	20	10	10	10	10			
		Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi pengurangan risiko bencana	Lokasi		38	38	38	24	24	35			
		Jumlah daerah yang menerapkan mitigasi bencana	Lokasi		25	25	25	25	25	36			
		Jumlah pertemuan pengurangan risiko bencana regional yang diselenggarakan	Kegiatan		4	4	4	4	4	4			
		Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	dokumen		5	5	5	5	5	5			
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	laporan		6	6	6	6	6	6			

INDIKATOR : 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah

PROGRAM: PENANGGULANGAN BENCANA /PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	Pengurangan Risiko Bencana	Jumlah dokumen kajian pengurangan risiko bencana	Dokumen		10	10	10	10	10	10			
		Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi	Dokumen		21	21	14	14	15	16			

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN						INDIKATIF ALOKASI	SUMBER	INSTANSI
-------------------------------------	--------	----------	-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------	----------

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN				SATUAN	BASLINE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN (5 TAHUN)	PENDANAAN	PELAKSANA
		Jumlah daerah yang mendapatkan fasilitasi penguatan pengurangan risiko bencana	Lokasi		20	20	20	20	20	20	25	650,450,000	APBD	BPBD
		Jumlah daerah yang menerapkan mitigasi bencana	Lokasi		25	25	25	25	26	27				
		Jumlah pertemuan pengurangan risiko bencana regional yang diselenggarakan	Kegiatan		4	4	4	4	4	4				
		Jumlah dokumen pedoman dan standarisasi pengurangan risiko bencana	Dokumen		5	5	5	5	5	5				
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	Laporan		6	6	6	6	6	6				

INDIKATOR : 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.

PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan 1 :	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Berpotensi dampak Lingkungan	Identifikasi usaha yang berpotensi dampak lingkungan	Unit Usaha		20	20	20	30	30	30	1,000,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 :	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan atau Proper	Jumlah Perusahaan yang ikut dalam penilaian peringkat Kinerja Perusahaan	Unit Usaha		5	5	5	10	10	10	750,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR : 12.4.2(a) Jumlah Limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)

PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan 1 :	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Pengendalian dan Pembinaan Kegiatan usaha penghasil Limbah B3	ton/th		3.5	3.5	3.5	4	5	5	800,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
---------------------	------------------------------	---	--------	--	-----	-----	-----	---	---	---	-------------	------	------------------------

INDIKATOR : 12.5.1(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang

PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan 1 :	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Peningkatan Apresiasi Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan dalam mengelola lingkungan	Kelompok		10	10	10	10	10	10	700,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 :	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Sungai dan Pesisir	Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran Air pada Sumber Air dan pesisir pantai	Sungai/ pantai		3	3	3	5	5	5	1,000,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR : 12.6.1 (a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001

PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan 1 :	Koordinasi Penyusunan AMDAL - UKL/UPL	Adanya Kajian dan Dokumen Lingkungan dan Informasi AMDAL	usaha		15	15	20	20	25	30	1,000,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 :	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Teridentifikasinya usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup	kec		5	5	5	10	10	10	800,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASLINE	TARGET PENCAPAIAN	INDIKATIF ALOKASI	SUMBER	INSTANSI
-------------------------------------	--------	---------	-------------------	-------------------	--------	----------

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN			SATUAN	PROBLEMA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN (5 TAHUN)	PENDANAAN	PELAKSANA
INDIKATOR: 13.1.1 Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah													
PROGRAM 1: Penanggulangan Bencana													
Kegiatan 1:	Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah Dokumen Kajian Pengurangan Risiko Bencana	dokumen		10	10	10	10	10	10			
		1.2. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	dokumen		17	19	19	19	19	20	875,430,000	APBD	BPBD
		1.3. Jumlah Dokumen Pedoman dan Standarisasi Pengurangan Risiko Bencana	dokumen		4	5	5	5	5	6			
INDIKATOR: 13.1.2 Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
PROGRAM 1: Penanggulangan Bencana													
Kegiatan 1:	Pengurangan Risiko Bencana	1.1. Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana daerah	Lokasi		39	39	39	39	40	40			
		1.2. Jumlah Lokasi Fasilitasi Penerapan Mitigasi Bencana	Lokasi		4	4	4	4	5	5	875,430,000	APBD	BPBD
INDIKATOR : 15.2.1.(d)Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.													
PROGRAM : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
Kegiatan 1 :	Pengelolaan dan Rehabilitasi Mangrove	Pemetaan Sebaran hutan Mangrove di 10 Kecamatan	Kec.		1	1	2	3	5	7	750,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 :	Konservasi Sumber Daya Air dan pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air	Peningkatan upaya Konservasi lahan dan air melalui penanam pohon	pohon		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	5,000,000,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

- 14 -

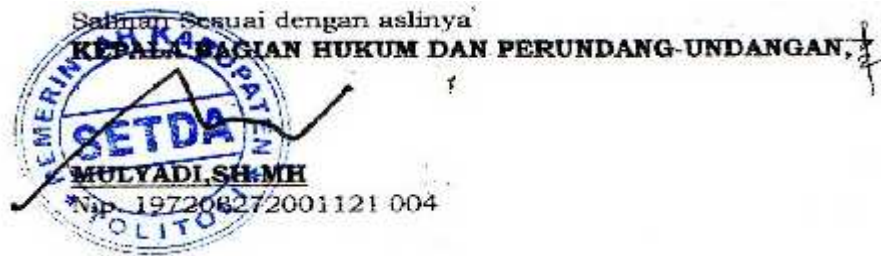
PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	BASELINE	Target Pencapaian						INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5	SUMBER PENDANAAN	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).												
Program 1: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur												
Kegiatan 1: Sistem Informasi jabatan dan Analisa beban Kerja	Dokumen Anjab	Buku				30	30	40	925,062,860	APBD	Bag.Ortal	
	Dokumen Peta Jabatan	Buku				40	50	60	375,000,000			
	ABK	Buku				40	50	60	300,000,000			
	Evaluasi Jabatan	Buku				40	50	60	375,000,000			
	Standar Kompetensi Manajerial	jabatan				878	878	878	375,000,000			
	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen				132	132	132	150,000,000			
Kegiatan 2: Pemanfaatan dan evaluasi Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai	76	77	78	79	79	80	170,000,000	APBD	Bag.Ortal	
	Persentase Peningkatan Penerapan SPM	%	80	80	80	80	95	100	100,000,000			
	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	inovasi	3	4	5	6	7	8	100,000,000			
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai pengambilan keputusan lembaga eksekutif (esel.I dan Esel. II)												
Program 1: Pembinaan dan Penjurangan Karier												
Kegiatan 1: Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	1.1 Jumlah PNS yang menduduki Jabatan sesuai Kompetensi	%	0	8,05	16,64	17,48	18,72	19,56	19,56	2,403,405,000	APBD	Badan Kepegawaian
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur												
Program 1: Penataan Administrasi Kependudukan												
Kegiatan 1: Pelayanan Keliling Pencatatan Akta Kelahiran, Kematian Perubahan Nama dan Pengangkatan Anak	1.1 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta kelahiran	Jiwa	1500	2000	2500	3000	3500	4000	303,690,000	APBD	Didukcapil	
INDIKATOR SDGs: 16.9.1(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah												
Program 1: Penataan Administrasi Kependudukan												
Kegiatan 1: Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.1 Jumlah Penduduk yang terlayani	Jiwa	750	1250	1500	2000	2250	2500	141,900,000	APB, DAK	Didukcapil	

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	BASELINE	Target Pencapaian						INDIKATIF ALOKASI	SUMBER PENDANAA	Instansi Pelaksana	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021				
INDIKATOR SDGs: 16.9.1(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran												
Program 1: Penataan Administrasi Kependudukan												
Kegiatan 1: Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	1.1 Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi	kecamatan		5	10	10	10	10	10	262,571,300	APBD	Didukcapil
INDIKATOR SDGs: 16.10.2(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan												
Program 1: Pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa												
Kegiatan 1: Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi dan Informasi	1.1 Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan PPIDP pembantu yang mengikuti bimbingan teknis	%					50	70	100	550,000,000	APBD	Bagian Humas dan Protokol

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN



MATRIKS III. PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA NON PEMERINTAH

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LEMBAGA PELAKSANA			
			2016	2017	2018	2019	2020					2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.														
PROGRAM : OPTIMALISASI														
Kegiatan 1.: Pengadaan dan Pemasangan Meter Pelanggan		1. Penggantian Meter Pelanggan	Unit	0	0	500	300	300	300	300	680,000,000	PDAM	Kab. Tolitoli	PDAM
Kegiatan 2.: Perluasan dan Cakupan pelayanan, Penambah SR		1. Sumbungan Rumah (SR) Desa Galumpang dan Desa Duinggis	Unit	0	0	60	10	10	10	10	80,000,000	PDAM	Desa Duinggis, Desa Galumpang	PDAM
		2. Sumbungan rumah (SR) (SPAM Kota Tolitoli)	Unit	0	0	100	200	1200	1200	1400	3,280,000,000	APBD	Kota Tolitoli	PDAM
		3. Sumbungan Rumah (SR) Kec. Galang	Unit	0	0	500	500	500	500	500	2,000,000,000	PDAM	Kec. Galang	PDAM
		4. Penaktifan Kembali Sumbungan tidak Aktif	Unit	0	0	0	200	200	200	200	24,000,000	PDAM	Kab. Tolitoli	PDAM
INDIKATOR: 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.														
PROGRAM : Peningkatan Efisiensi														
Kegiatan : 1	Pengadaan dan Pemasangan Water Meter Induk, Perpipa dan Valve	1.1 Pengadaan Strainer (saringan) 250 m	unit	0	0	0	1	0	0	0	18,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		2. Pengadaan Gate Valve 250 mm (AVK)	Unit	0	0	0	4	0	0	0	65,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		3. Pengadaan PIPA Transmisi 250 mm	meter	0	0	0	300	0	0	0	150,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		4. Accessoris Pipa	ls	0	0	0	0	1	0	0	27,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		3. Rehabilitasi BAK Pra Sedimentasi	Unit	0	0	0	0	0	0	1	250,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		3. Pekerjaan Bak Pra Sedimnetasi	bh	0	0	0	1	0	0	0	840,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
Kegiatan : 2	Rehabilitasi Unit dan Proses IPA	1. Pekerjaan IPA Kap.10 liter/detik	bh	0	0	0	1	0	0	0	2,002,290,000	APBN	Kec. Dako Pemean	PDAM
		2. Pekerjaan Reservoar Kap.200 M3290	m	0	0	0	2	0	0	0	1,786,240,000	APBN	Kec. Dako Pemean	PDAM
		3. Pekerjaan Sarana dan Prasarana	bh	0	0	0	1	0	0	0	1,737,245,000	APBN	Kec. Dako Pemean	PDAM
Kegiatan : 3	Pengadaan dan pemasangan Peralatan Penunjang OP PA	1. Pengadaan manometer Immersed	bh	0	0	0	0	1	0	0	4,000,000	APBD	Kec. Dako Pemean	PDAM
		2. Rehabilitasi Jaringan PIPA Transmisi	m	0	0	0	0	1	0	0	150,000,000	APBN	Kec. Dako Pemean	PDAM
		3. Accessoris PIPA	ls	0	0	0	0	1	0	0	27,000,000	APBN	Kec. Dako Pemean	PDAM

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LEMBAGA PELAKSANA		
			2016	2017	2018	2019	2020					2021	
INDIKATOR: 7.1.1* Rasio elektrifikasi													
PROGRAM : Program Listriks Desa													
Kegiatan 1.: Pembangunan Listrik Desa	1. Jaringan Listrik Desa	Desa	0	0	1	4	3	0	0	-	PMN, Anggaran Investasi PLN	Desa Labonu, Desa Ogosipat, Desa Galandau, Desa kinapasan, Desa Ogolali, Desa Bambilaga	PLN
	2. Jumlah Gardu Yang dibangun	Gardu	0	0	3	7	8	0	0	-			PLN
	3. Panjang Jaringan SUTM 20 KV	kms	0	0	11.943	19	31.028	0	0	-			PLN
	4. Panjang Jaringan SUTR	kms	0	0	6.908	10.085	11.895	0	0	-			PLN
	5. Calon Pelanggan	kk	0	0	323	565	483	0	0	-			PLN
INDIKATOR: 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita													
PROGRAM : Subsidi Listriks													
Kegiatan 1.: Tarif/Daya	1. S.1/220 VA	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-	PMN, Anggaran Investasi PLN		PLN
	2. S.2/450 VA I	Pelanggan	0	237	233	229	0	0	0	-			PLN
	3. S.2/900 VA I	Pelanggan	0	390	400	417	0	0	0	-			PLN
	4. S.2/1.300 VA	Pelanggan	0	94	120	140	0	0	0	-			PLN
	5. S.2/2.200 VA	Pelanggan	0	39	44	52	0	0	0	-			PLN
	6. S.2/3.500 VA s/d 200 KVA	Pelanggan	0	56	58	74	0	0	0	-			PLN
	7. S.3/200 KVA	Pelanggan	0	0	0	1	0	0	0	-			PLN
	8. R.1/450 VAI	Pelanggan	0	21858	21.807	21.794	0	0	0	-			PLN
	9. R.2/900 VAI	Pelanggan	0	16334	4.027	4.255	0	0	0	-			PLN
	10. B.1/450 VAI	Pelanggan	0	298	293	292	0	0	0	-			PLN
	11. B.1/900 VAI	Pelanggan	0	669	667	661	0	0	0	-			PLN
	12. B.1/1.300 VA	Pelanggan	0	402	447	464	0	0	0	-			PLN
	13. B.1/2.200 VAI s/d 5.500	Pelanggan	0	451	520	559	0	0	0	-			PLN
	14. LI/450 VAI	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN
	15. LI/900 VAI	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN
	16. LI/1.300 VAI	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN
	17. LI/2.200 VAI	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN
	18. LI/3.500 s/d 14 KVA	Pelanggan	0	5	5	5	-	0	0	-			PLN
	19. I.2/> 14 KVA s/d 200 KVA	Pelanggan	0	12	12	14	-	0	0	-			PLN
	20. P.I/ 450 VA	Pelanggan	0	52	50	50	-	0	0	-			PLN
	21. P.I/ 900 VA	Pelanggan	0	69	70	72	-	0	0	-			PLN
	22. P.I/ 1.300 VA	Pelanggan	0	63	71	72	-	0	0	-			PLN
	23. P.I/ 2.200 VA s/d 5.500	Pelanggan	0	52	55	61	-	0	0	-			PLN
	24. T/> 200 KVA	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN
	25. C/TM> 200 KVA	Pelanggan	0	0	0	0	0	0	0	-			PLN

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PENCAPAIAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN (5 TAHUN)	SUMBER PENDANAAN	LOKASI	LEMBAGA PELAKSANA
			2016	2017	2018	2019	2020				

INDIKATOR: 1.2.1*. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
PROGRAM : PROGRAM KUR														
Kegiatan : 1	Pemberian KUR Mikro Usaha Mikro dan Menengah	1.Sektor Pertanian dan Kehutanan	Debitur	0	1,550,373,210	1,722,636,900	1,914,041,000	2,105,445,100	2,315,989,610	2,547,588,571	12,156,074,391	Bank Sulteng (100 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
		2. Sektor Perikanan	Debitur	0	734,387,310	815,985,900	906,651,000	997,316,100	1,097,047,710	1,206,752,481	5,758,140,501	Bank Sulteng (75 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
		3. Sektor Pertambangan	Debitur	0	489,591,540	543,990,600	604,434,000	664,877,400	731,365,140	804,501,654	3,838,760,334	Bank Sulteng (33 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
		4. Sektor Industri Pengolah	Debitur	0	407,992,950	453,325,500	503,695,000	554,064,500	609,470,950	670,418,045	3,198,966,945	Bank Sulteng (41 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
		5. Konstuksi	Debitur	0	2,692,753,470	2,991,948,300	3,324,387,000	3,656,825,700	4,022,508,270	4,424,759,097	21,113,181,837	Bank Sulteng (5 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
		6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	Debitur	0	4,487,922,450	4,986,580,500	5,540,645,000	6,094,710,500	6,704,181,550	7,374,599,705	35,188,639,705	Bank Sulteng (110 Dbtr)	Tolitoli	Bank Sulteng
Kegiatan : 2	Corportaion Social Responsibility (CSR)	1.Bantuan Bea Siswa Akper Pemda	jiwa	0	10,530,000	11,700,000	13,000,000	14,300,000	15,730,000	17,303,000	82,563,000	Bank Sulteng (9 Jiwa)	Tolitoli	Bank Sulteng
		2. Bantuan Bea Siswa STI Pertanian	jiwa	0	-	-	15,000,000	16,500,000	18,150,000	19,965,000	69,615,000	Bank Sulteng (11 Jiwa)	Tolitoli	Bank Sulteng
		3. Bantuan Motor Sampah (Peryamanan dan Kebersihan)	bh	0	240,000,000	-	-	-	-	-	-	240,000,000	Bank Sulteng (5 bh)	Tolitoli

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MULYADI, SH.,MH

Nip. 19720827 200112 1 004